

### Daftar Pustaka

- E Susanti, “Peran Bawaslu Pada Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Tahun 2017”, *Petitum*, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2019.)
- Glenn Katherin dan Sujit Choudry, “Constitutional Review in Democracies”, *Constitutional Transition at Nyu Law*, Vol. 40 No. 3, September, 2013.
- Handayani Sri R., & Fahmi. K., “Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 3 No. 2, Desember, 2019.
- I Pahlevi, “Dinamika Sistem Pemilu masa Transisi di Indonesia”, *Jurnal Politicia Dinamika Masalah Politik dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol. 5 No. 2, Juni, 2016.
- International IDEA.
- Judri Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Junaidi Veri, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Cet. 1, Themis Books, Jakarta.
- Kapitan Rian Van Frits, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, *MMH*, Vol. 44 No. 4, Oktober, 2015.
- Lailam Tanto & Nasrullah, 2019, *Politik Hukum Pemilukada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Lailam Tanto & Putri Anggia, “Pengenjampingan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas pada Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 2, Juni, 2020.
- Liany Lusi, “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no 1, Juni, 2016.
- Mahardika Ahmad Gelora, “Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih serta Penyelesaiannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 1, November 2021.
- Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober 2018.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Moad Y, “Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 1, Juni 2018.

Nugraha Fajar Kuala, “Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)”, Jurnal Transformative, Vol. 12 No. 1, September, 2016.

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010.

Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, 2012, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Poli Chrisandy M, “Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum”, Lex Administratum, Vol. 9 No. 6, September, 2021.

Putra Hendrasyah, “Manipulasi Pemilu Dalam Proses Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015”, Jurnal KPU, Vol. 2 No. 2, September, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PHPU.DVI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XVI/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUPXIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.BUPXIX/2021.

R. Subakti., & dkk, 2011, Seri Demokrasi Elektoral Buku 16 Penanganan Sengketa Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.

Rosnawati, “Dinamika Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Indonesia”, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4 No. 1, Juni 2022.

Satriawan Iwan, 2012, Studi Efektifitas Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Satrio Abdurrachman, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politics”, Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 1, Mei, 2016.

Siahaan Maruarar, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono Bambang, 2016, Metodologi penelitian hukum Jilid 1V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Thohari A. Ahsin, 2016, Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia, Erlangga, Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Widodo Heru, 2017, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilukada Serentak di Mahkamah Konstitusi, Sinar Grafika, Jakarta.

- Wijaya Adam Bintang Danesa, “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dalam Perspektif Pasal 24 C Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonensia 1945”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 20, Maret, 2023.
- Yanti Herma, “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Tata Usaha Neagara”, *Legalitas*, Vol. 6 No. 1, Juni, 2014.
- Yanti Herma, “Gagasan constitutional Complaint Sebagai kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional”, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 2, Oktober, 2018.
- Yulianto, “Problematika Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024”, *Jurnal Keadilan Pemilu*, Vol. 2 No. 2, Januari, 2021.
- Zoelva Hamdan, “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 3, September, 2013.